

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

FANIA ERLANGGA
1108524 / 2011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten 50 Kota)

Nama : Fania Erlangga
NIM/TM : 1108524/2011
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2016

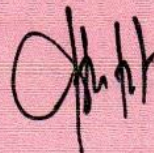
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 19840113 201012 2 009

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten 50 Kota*)

Nama : Fania Erlangga

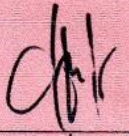
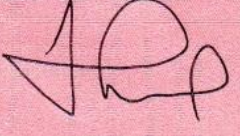
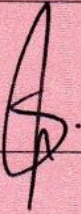
NIM/TM : 1108524/2011

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2016

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	TandaTangan
1.	Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Mayar Afriyenti. SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fania Erlangga
NIM/Thn.Masuk : 1108524/2011
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh, 21 Januari 1993
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Beringin Raya No.30A Lolong Belanti Kec. Padang Utara
No. Hp/Telpon : 082386040123
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten 50 Kota*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, April 2016
Yang menyatakan,




Fania Erlangga
1108524/2011

ABSTRAK

Fania Erlangga : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten 50 Kota). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2016.

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
2. Mayar Afriyenti SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten limapuluh kota.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Limapuluh Kota. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala Bagian keuangan dan Staf Bagian Keuangan/penatausaha pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Model (SEM)* yang diolah dengan menggunakan *SmartPLS 3.0*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan kepemimpinan dan pelaksanaan SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota. Didalam hasil pengujian juga diperoleh kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening, kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening, dan selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk mencoba menambahkan jumlah ukuran sampel yang akan digunakan, serta merubah model analisis yang digunakan. 2) Bagi instansi pemerintah kabupaten limapuluh kota disarankan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara teratur dan terencana.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing akademik.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Bapak dan Ibu Kepala Bagian pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko kabupaten 50 kota yang telah membantu penulis memberikan data penelitian.
6. Kedua orangtua (Ayahanda Failus Syarif dan Ibunda Salmiati) yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa tulus ikhlas serta dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2011.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2. Kualitas Sumber Daya Manusia	21
3. Kepemimpinan	22
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	26

5. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	33
D. Hipotesis	36
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi Dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Variabel Penelitian	41
F. Pengukuran variabel	42
G. Instrumen Penelitian	43
H. Uji Instrumen	44
I. Metode Analisis	48
J. Pengujian Hipotesis	56
K. Definisi Operasional	57
BAB IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
B. Demografis Responden	62
C. Analisis Data	79
D. Pengujian Hipotesis	84
E. Pembahasan	91

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kab. 50 Kota	3
2. Daftar Nama SPKD Pemerintah Kab. 50 Kota	38
3. Skala Pengukuran	42
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	42
5. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian	46
6. Prosedur Pengambilan Sampel	60
7. Demografis Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
8. Demografis Responden Berdasarkan Tingkatan Usia	62
9. Demografis Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan	63
10. Demografis Responden Berdasarkan Target SKPD	64
11. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	65
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan	68
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia	70
14. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	73
15. Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan	75
16. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	77

17. <i>Outer Loadings</i>	79
18. <i>Composite Reliability dan Average Variance Extracted</i>	81
19. Nilai <i>R-Square</i>	82
20. Pengaruh Langsung	84
21. Pengaruh Tidak Langsung	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	36
2. Model Hubungan Variabel	82
3. Model Struktural Langsung	87
4. Model Struktural Tidak Langsung	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	106
2. Tabulasi Data Pilot Test	111
3. Validitas dan Reliabilitas	116
4. Tabulasi Data Penelitian	126
5. Uji Hipotesis	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah sering menjadi sorotan serta menjadi berita utama dimedia terkemuka. Permasalahan yang dibahas berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik. Didalam laporan keuangan pada umum informasi yang disampaikan relatif positif, sedangkan dalam pernyataan pemerintah melalui media mereka mengisyaratkan adanya sejumlah masalah.

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh indikator relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), tepat waktu (*timeliness*) dan dapat dipahami (*understandability*). Sesuai dengan teori menunjukan indikator utama dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas adalah relevan (*relevance*), maksudnya adalah informasi yang disampaikan didalam laporan adalah informasi yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator kedua adalah andal (*reliability*), maksudnya adalah informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah informasi yang akurat dan handal.

Dibandingkan (*comparability*) maksudnya adalah informasi yang disampaikan didalam laporan keuangan harus lengkap dan rinci. Tepat waktu (*timeliness*) merupakan ketepatan publikasi laporan keuangan, sedangkan dapat dipahami (*understandability*) menunjukan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus mudah dipahami oleh pihak pihak yang menggunakannya. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Salah satu kabupaten yang berada dibawah naungan pemerintah Sumatera Barat adalah 50 Kota. Pemerintah setempat selalu berusaha untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, akan tetapi usaha tersebut selalu banyak mengalami kendala, seperti nilai relevansi yang tidak akurat, tingkat kehandalan dan kelengkapan laporan yang masih harus diperbaiki dan seringnya pemerintah daerah terlambat didalam mempublikasikan laporan keuangan. Bukti masih harus ditingkatkannya kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten 50 Kota terlihat dari opini audit yang dikeluarkan oleh tim audit pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir terlihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten 50 Kota Tahun 2010 – 2014

Tahun	Opini Audit
2010	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: www.bpk.go.id

Pada tabel 1 terlihat bahwa opini audit yang terbentuk adalah wajar dengan pengecualian, opini tersebut bertahan dalam tempo lima tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota harus ditingkatkan. Dalam hal ini permasalahan yang harus diperbaiki adalah tingkat relevansi laporan, tim pembuat laporan harus benar-benar menjamin informasi keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, selain itu tim penyusun laporan keuangan harus benar-benar pihak profesional dan bersifat independen, sehingga kehandalan, kelengkapan, dan *timeliness* laporan dapat diciptakan.

Mulyadi (2011) untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas sumber daya manusia yang ditugaskan menyusun laporan, gaya kepemimpinan dalam tim yang ditugaskan dalam pembuatan laporan dan adanya sistem pengawasan terhadap isi laporan sebelum laporan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Hal yang sama juga terungkap dalam penelitian Ayuningtias (2013) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sejumlah variabel, baik dari variabel yang bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan. Menurut Widyawati (2014) faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berasal dari dalam perusahaan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan yang digunakan serta independensi dalam pembuatan laporan keuangan. Jika mengacu kepada variabel tersebut kualitas sumber daya manusia tentu memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Syafarudin alwi, M.S (2008), Kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Organisasi juga harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia terutama didalam pemahaman laporan keuangan akan mendorong meningkatnya kualitas laporan yang dibuat.

Begitu banyak variabel yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, salah dari sekian banyak faktor tersebut adalah kepemimpinan. Menurut Robbins dan Timothy (2013), kepemimpinan merupakan sebuah tatanan antara wewenang, hak dan kewajiban. Kepemimpinan merupakan sebuah model perilaku yang bersifat mengatur. Oleh sebab kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan. Jika kepemimpinan yang diterapkan transparan dan relatif disukai oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan maka laporan keuangan yang diselesaikan akan meningkat kualitasnya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi

informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Oleh sebab itu kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentu informasi yang disampaikan harus *valid*, *reliables*, *timeline* dan mudah dipahami, untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan penyajian laporan maka diperlukan bantuan teknologi informasi terutama yang berbasis akuntansi. Penggunaan teknologi informasi tentu akan mendorong informasi laporan keuangan kecil dari kesalahan, sehingga muncul kepercayaan diri dari instansi untuk melakukan audit internal terhadap informasi didalam laporan, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka perlu dilakukan pengawasan internal. Proses pengawasan dilakukan oleh pihak internal atau pun eksternal. Didalam melakukan pengendalian pada laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah menerapkan sebuah sistem yang disebut dengan SPIP. Pengembangan SPIP pertama kali dikembangkan pada tahun 2008, dimana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan literatur dan penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan SPIP dijadikan variabel perantara. Menurut Syafrifudin (2014) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan SPIP sebagai variabel intervening. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi dan pengalaman individu dalam penyusunan laporan keuangan dan diperkuat dengan adanya pelaksanaan SPIP pasti akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan.

Syafrifudin (2014) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan SPIP sebagai variabel intervening. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan membantu ketepatan dan akurasi hasil pembuatan laporan keuangan, semakin tinggi frekuensi pemanfaatan akan mendorong semakin mudah sistem pengendalian internal pemerintah untuk dilaksanakan.

Selain itu peneliti juga memasukan satu variabel baru yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kepemimpinan. Dalam hal ini kepemimpinan yang dikembangkan didalam lembaga pemerintah harus mendorong kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Jika seorang pemimpin ikut berpartisipasi memberikan arahan dan motivasi kepada pegawainya dan mendukung adanya pelaksanaan SPIP maka laporan keuangan yang dibuat harus memiliki ketepatan dan akurasi yang tinggi, sehingga dengan adanya proses pengendalian yang kembali dilakukan oleh

pemerintah akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Saleh dan That 2014). Oleh sebab itu peneliti menyakini bahwa perpaduan atau interaksi antara kepemimpinan dan sistem pengendalian internal pemerintah akan menciptakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah berkualitas.

Hasil penelitian Mahaputra dan Putra (2014) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian interen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Nurillah dan Muid (2014) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara individual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan Husna (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan interen pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Syarifudin (2014) ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Widianingrum dan Rahmawati (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kehandalan laporan keuangan dengan menjadikan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa keberadaan kualitas sumber daya manusia yang handal serta dukungan teknologi informasi yang canggih dan diperkuat oleh

adanya sistem pengendalian interen akan mendorong menguatnya kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kepada uraian ringkas latar belakang masalah dan fenomena penelitian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian modifikasi dari Syarifudin (2014) dan Widianingrum dan Rahmawati (2010). Faktor pembeda didalam penelitian ini adalah waktu, dan lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga memasukan satu variabel baru yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota)”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ?
2. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ?
3. Sejauhmana pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ?
4. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ?

5. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
6. Sejauhmana kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
7. Sejaumana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
2. Pengaruh pelaksanaan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
3. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
5. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.

6. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
7. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Peneliti, dimasa mendatang hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi peneliti dimasa mendatang, karena hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan replikasi bagi perkembangan penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Kantor pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan publikasi yang mereka miliki dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat hingga pelaksanaan SPIP serta pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam penyusunan laporan khususnya di Kabupaten 50 kota.
3. Praktitis, hasil yang diperoleh didalam penelitian ini tentu dapat memberikan manfaat positif bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini, baik di perpustakaan atau pun dilakukan secara online.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Nordiawan, 2007).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan Bastian (2010) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Menurut standar internasional akuntansi sektor publik (*International Public Sector Accounting Standards- IPSAS*) dalam Nordiawan (2007) menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

2. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
4. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
5. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
6. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
7. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
8. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
9. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
10. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi

yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat.

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Soewardjono (2005) merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketetapan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatanwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh indikator relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), tepat waktu (*timeliness*) dan dapat dipahami (*understandability*). Sesuai dengan teori menunjukan indikator utama dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas adalah relevan (*relevance*), maksudnya adalah informasi yang disampaikan didalam laporan adalah informasi yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator kedua adalah andal (*reliability*), maksudnya adalah informasi

yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah informasi yang akurat dan handal.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK Tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 71 Tahun 2010:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketetapan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketetapan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas merupakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak

dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

d. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yaitu independensi laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, gaya kepemimpinan, sistem pengawasan dan reputasi auditor yang digunakan. Masing masing variabel tentu akan berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pada penelitian ini faktor yang digunakan dibatasi hanya menggunakan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki auditor yang digunakan, gaya kepemimpinan dan dilakukannya proses pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan public didalam lingkungan pemerintah daerah.

Gibson et al (2011) kualitas sumber daya manusia adalah kompetensi yang dimiliki individu untuk melakukan berbagai tugas. Kualitas sumber daya manusia tentu bukan sesuatu yang sifat tetap akan tetapi dapat berubah sesuai dengan bidang pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang dilakukan individu. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang digunakan didalam penyusunan laporan keuangan akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut Robbins dan Timothy (2013) kepemimpinan berhubungan dengan tata kelola procedural dalam melaksanakan wewenang,

mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja. Gaya kepemimpinan yang digunakan akan sangat berhubungan dengan sistem atau cara pimpinan untuk mengorganisasikan karyawan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan perusahaan. Jika leadership didalam organisasi berjalan dengan baik, serta mendapatkan dukungan dari seluruh elemen organisasi maka kinerja laporan keuangan yang dihasilkan akan mengalami peningkatan.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan adanya pengawasan internal atau eksternal dari lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan pemerintah adalah adanya pelaksanaan SPIP, yang akan menguji relevansi informasi didalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan dengan bukti autentik yang sesungguhnya khususnya dilakukan pada lembaga yang dikelola pemerintah daerah di Indonesia.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Menurut Gibson et al (2011) kualitas sumber daya manusia merupakan nilai atau manfaat yang dirasakan oleh setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Nilai atau manfaat yang dirasakan individu adalah dalam bentuk kemakmuran, seperti merasakan tingkatan pendidikan tinggi.

3. Kepemimpinan

Dalam kehidupan organisasi pemimpin memainkan peranan penting dalam menentukan usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kehadiran pemimpin memungkinkan manusia organisasional untuk di motivasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kepemimpinan menurut Koortz dalam Tika (2006) adalah pengaruh, kiat atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka mau berusaha sepenuh hati dan antusias untuk

mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Hasibuan (2006) kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Farland dalam Danim (2004) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan memberi pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi aktifitas pimpinan antara lain dapat terjelma dalam bentuk memberi perintah, membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Pengertian kepemimpinan menurut Rivai dan Sagala (2009) adalah meliputi:

“Proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, mempengaruhi interpretasi, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok”.

Menurut Danim (2004) kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi atau memberi arah kepada individu atau kelompok lainnya yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan

situasi yang ada. Efektivitas seorang pemimpin mensyaratkan agar pemimpin tersebut memberlakukan orang lain dengan baik, sementara memberikan motivasi agar mereka menunjukkan performa yang tinggi dalam melaksanakan tugas (Gordon, 1998) dalam Robbins dan Timothy (2013). Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Fungsi-fungsi Kepemimpinan

Pemimpin dalam kepemimpinannya tidak hanya bertugas sebagai seseorang yang memiliki kemampuan lebih yang ditunjuk sebagai pengatur yang lainnya, tetapi ia juga harus bisa menjadi teladan dan sumber semangat bagi pegawainya. Menurut Rivai dan Sagala (2009:53) fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi yaitu:

- 1) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan dan aktifitas pemimpin.
- 2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi.

Secara operasional fungsi-fungsi pokok pimpinan menurut Rivai dan Sagala (2009) yaitu:

- 1) Fungsi instruktif adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melaksanakan perintah.

- 2) Fungsi Kumulatif adalah memperoleh masukan beberapa umpan balik yang dapat dipergunakan memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.
- 3) Fungsi partisipatif adalah usaha pemimpin mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
- 4) Fungsi delegasi adalah memberikan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin yang lebih tinggi.
- 5) Fungsi pengadilan, dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Menurut Hasan (2006) Pemimpin harus memiliki performa kerja dan dapat menjadi teladan melalui kualitas kerja, sikap dan perilaku yang diharapkan dan dituntut oleh kelompok kerjanya.

Ismaya (2005) menjelaskan enam belas petunjuk khusus yang harus dimiliki pemimpin dalam rangka mengelola hubungan dalam lingkungan kerja suatu organisasi yaitu: memusatkan dan menunjukkan tekanan pada sasaran, tingkatkan hubungan antar pribadi, memberikan umpan balik yang bersifat membangun, lindungi bawahan dari para penyerang, berikan

cukup waktu untuk berpikir, bangun rasa kepercayaan diri, ketahui bagaimana cara menangani kegagalan. Kenali kebutuhan dan rangsangan dari luar, berikan arah yang benar. Berikan suasana yang aman, kenali kreatifitas secara terbuka, pahami bahwa kreatifitas kerja saja tidak cukup, dan berikan evaluasi dan umpan balik seketika, menerima kekurangan-kekurangan kecil serta memelihara suasana intrapreuveural dan imbangi kebutuhan terhadap kebebasan dan keharusan struktur.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikn andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Teknologi merupakan seperangkat sumber daya yang dioperasikan manusia untuk membantu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan individu. Teknologi merupakan perangkat yang rumit dan mahal, untuk menggunakannya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk membantu terjadinya

efektifitas perusahaan untuk meningkatkan eksistensi diri dalam jangka panjang. Pemanfaatan teknologi didalam organisasi tentu akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan waktu serta merupakan bagian dari investasi jangka panjang.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga menjadikan kualitas laporan keuangan tersebut menjadi baik.

5. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah

Menurut Rai dalam Susilawati (2014), sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Elder (2011), sistem pengendalian intern memiliki tujuan umum, sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

Meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan.

2. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi

Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna laporan

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Pada Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
- b. Keandalan Laporan Keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan kuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan pedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengendalian intern pemerintah ditujukan untuk melakukan pengendalian terhadap laporan keuangan yang telah diselesaikan oleh pihak internal perusahaan. Pengendalian intern pemerintah juga dimaksudkan untuk mengurangi kecurangan atau ketidak relevanannya didalam laporan keuangan. Selain itu kegiatan pengendalian internal pemerintah juga ditujukan untuk menjaga standar kualitas laporan keuangan pemerintah. Kegiatan pengawasan internal oleh lembaga pemerintah selalu rutin dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan selalu menjadi agenda bagi auditor pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa, pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah kota Banda Aceh.

Pada penelitian Hilma Herniyasa (2015) yang meneliti mengenai pengaruh penerapan gaya kepemimpinan dan *good university governance* terhadap kualitas laporan keuangan bahwa gaya kepemimpinan dan *good university governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada politeknik negeri yang ada pada kota Bandung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2015), yang meneliti mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB, dia menyatakan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Dan Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan SAP, kompetensi aparatur dan fungsi audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pada penelitian Syarifudin (2014) ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel

intervening. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Widianingrum dan Rahmawati (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kehandalan laporan keuangan dengan menjadikan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keberadaan kualitas sumber daya manusia yang handal serta dukungan teknologi informasi yang canggih dan diperkuat oleh adanya sistem pengendalian intern akan mendorong menguatnya kualitas laporan keuangan.

Pada penelitian Nurillah dan Muid (2014) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota Depok, ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena kurangnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum optimal dan masih kurangnya peran internal audit dalam pemerintahan.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dapat dibuat model kerangka berfikir yang dapat dipedomani dalam proses pengolahan data. Sesuai dengan sejumlah *literature* dan referensi peneliti berkesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel intervening. Makna yang tersirat dari simpulan tersebut menunjukkan bahwasemakin tinggi kompetensi yang dimiliki akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan dibuat atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia akan membuat arus informasi yang tercatat dan dipublikasikan didalam laporan keuangan menjadi lebih akurat dan sempurna, sehingga proses pengawasan intern pemerintah dapat dilaksanakan dengan mudah, karena adanya percaya dari seluruh pihak yang terlibat didalam pembuatan laporan yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang mereka miliki berkualitas dan kecil dari kesalahan, selain itu melalui sistem pengawasan intern pemerintah akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu semakin tinggi kompetensi dan pengalaman individu dalam membuat atau menyusun laporan keuangandan diperkuat oleh adanya pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pasti akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan.

Jika kepemimpinan yang diterapkan transparan dan relatif disukai oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan maka laporan keuangan yang diselesaikan akan meningkat kualitasnya. Peneliti juga

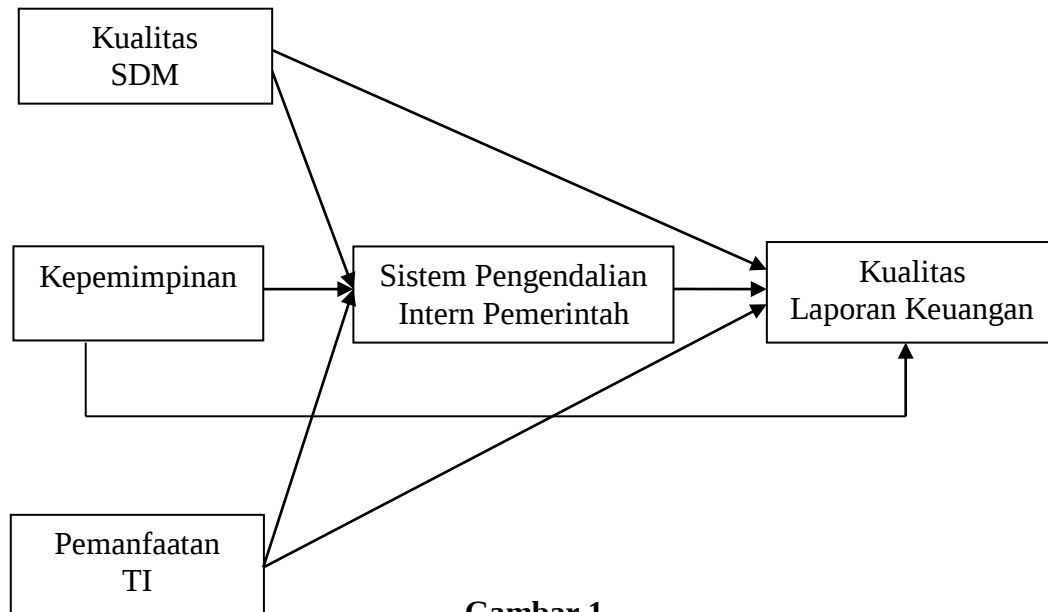
beranggapan bahwa adanya pengaruh antara kepemimpinan dan sistem pengendalian intern pemerintah. Peneliti membuat sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang dikembangkan didalam lembaga pemerintah harus mendorong pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Jika sistem pemerintahan semakin mendukung adanya pengendalian intern oleh pemerintah maka laporan keuangan yang dibuat harus memiliki ketepatan dan akurasi yang tinggi, sehingga dengan adanya proses pengendalian yang kembali dilakukan oleh pemerintah akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu peneliti menyakini bahwa perpaduan atau interaksi antara kepemimpinan dan sistem pengendalian internal pemerintah akan mempekuualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Disamping adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kepemimpinan yang mendukung sistem pengendalian internal pemerintah, faktor lain yang mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit

kerja. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentu informasi yang disampaikan harus *valid, reliables, timeline* dan mudah dipahami, untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan penyajian laporan tersebut maka diperlukan bantuan teknologi informasi terutama yang berbasis akuntansi. Sehingga dengan adanya teknologi informasi dan didukung dengan sistim pengendalian intern pemerintah akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga akan menjadikan laporan keuangan yang berkualitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dan diperkuat oleh adanya pengawasan intern oleh pihak pemerintah akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu sistem pengendalian intern pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai variabel perantara yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian ringkas penjabaran masing masing keterkaitan antar variabel penelitian, maka dapat dibuat sebuah model kerangka berfikir seperti terlihat didalam gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kepada landasan teori dan kerangka konseptual yang telah dilakukan maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
- H₂ Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
- H₃ Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.

- H₄ Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
- H₅ Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
- H₆ Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.
- H₇ Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilajukan dapat diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan didalam penelitian ini yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota.
2. Sistem pengendalian interen pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota
3. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota
5. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening.
6. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening.

7. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening.

B. Saran

Berdasarkan kepada analisis hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran yang tentu dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Pihak SKPD, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka individu yang menjadi perangkat pengelola SKPD harus memiliki kualitas kompetensi yang tinggi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai hal yang penting seperti pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan, oleh sebab itu melalui kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan khususnya di SKPD sekabupaten Limapuluh Kota.
2. Pihak SKPD, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara teratur dan terencana, kegiatan tersebut akan memberikan ancaman yang mendorong individu yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan akan bersungguh sungguh dalam membuat atau pun mempublikasikan laporan keuangan.
3. Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk mencoba menambahkah jumlah ukuran sampel yang akan digunakan, serta merubah model analisis

yang digunakan, karena masih terdapat sejumlah hubungan yang dapat dibetuk oleh masing masing variabel independen, selain itu peneliti dimasa mendatang harus menambah minimal satu variabel baru yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak digunakan didalam penelitian ini, saran tersebut sangat penting untuk mendorong meningkatnya hasil penelitian yang diperoleh dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfison. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Surabaya: Andi.
- Arikunto Surasmi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Elder, Randali J. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat
- Farlan Sudirman dan Danim. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Fikri Ali M, Inapty Biana Adha dan Sri Pancawati Martiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Gibson L James, John M, Ivancevich, James H Donelly dan Robert Konopaske. 2011. *Organization Behavior, Structure, Processes*. Fourteenth Edition. Mc Graw-Hill, Irwin.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan Limcol. 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan SP. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husna Fadhillah. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintahan Kota Padang Panjang). *E-Journal Universitas Negeri Padang*
- Ismaya Sudjana. 2005. *Kepemimpinan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khoirul. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Mahaputra I Putu Upahayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2014*, Bali.
- Mardiasmo. 2009. *Dasar Dasar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurillah As Syifa dan Muid Dul. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntanasi Keuangan Daerah (SAKD) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Dipenegoro Journal of Accounting Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014*.
- Noerdiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rivai Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Romney, M.B dan Steinbart P.J. 2006. *Accounting Information Systems*. New Jersey. Person Education Inc.
- Robbins Stephen P & Timothy A Judge. 2013. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour) Edisi 12*. Diterjemahkan Oleh Diana Angelica. Jakarta: Salemba Empat.
- Roviyantie. 2011. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. *Tesis Mahasiwa*. Universitas Erlangga, Surabaya.
- Sekaran Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Siagian SP. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso S.R. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

- Syarifudin Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Interevening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen). *Simposium Nasional Akuntsansi XV Mataram*.
- Sugiyono Harhap. 2007. *Metodologi Penelitian*. Ghalia, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Susilawati, 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 201*. STIE STEMBI – Bandung Business School.
- Sutaryo, 2011. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Economic Nomor 4 Volume 2*. Universitas Negeri Solo.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Tika Wicaksono. 2006. *Leadership*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Widarjono, Agus. 2015. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Winidyaningrum Celviana. 2010. Pengaruh Sumber Daya Mabusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Yuliani Syafrida. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerahdan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 3 Nomor 2 Juli 2010* Hal 206 – 220.